

KONDISI UMKM MASA PANDEMI COVID-19 PADA PERTUMBUHAN EKONOMI KRISIS SERTA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Arin Ramadhiani Soleha¹

¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo

Email: arinramadhiani@gmail.com

Abstract

This research examines the condition of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on Indonesia's economic growth during the Covid-19 pandemic that we experienced from March to September 2020. This research also examines the government's efforts to encourage MSMEs to keep running in times of economic crisis. this. The purpose of this study is to determine the extent to which MSMEs survive the continuity of economic growth in Indonesia. This type of research is a qualitative descriptive analysis. This data collection method is obtained from secondary data. From the results of data analysis, it can be concluded that MSMEs are able to encourage economic growth in Indonesia, of course, assisted by government policy efforts.

Keywords: *Economic Growth, Economic Recession, Government Policy Efforts, MSME, Pandemic.*

1. PENDAHULUAN

Latar belakang

Dunia sedang menghadapi pandemi covid-19 tak terkecuali Indonesia. Masuknya Covid-19 di Indonesia terhitung sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang di bulan September 2020. Tercatat pada tanggal 10 September 2020 terdapat penambahan kasus yang terkonfirmasi terkena covid-19 sebanyak 3.861 pasien. Pertambahan kasus yang terkonfirmasi pada masa covid-19 ini sangat berpengaruh pada berbagai sektor di Indonesia, salah satunya ialah sektor ekonomi. Dalam sektor ekonomi masa pandemi covid-19 ini berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat, tingkat konsumsi yang rendah mengakibatkan turunnya pendapatan riil nasional sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lesu.

Menurut Sukirno (2000) mengenai pertumbuhan ekonomi yakni keberhasilan suatu negara yang diukur dari seberapa besar negara tersebut memproduksi baik barang maupun jasa yang tentunya dipengaruhi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas dari faktor-faktor produksi yang nantinya akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori ekonomi makro, tolak ukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi yakni seberapa besar perkembangan dari pendapatan nasional riil yang bisa diperoleh dalam suatu negara tersebut.

Faktanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat ini kian memburuk. Dalam acara yang diselenggarakan Katadata pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dengan bertepatan *Asian Insights Conference 2020: Navigating a Brave New World*, Piter Abdullah Redjalam selaku Direktur Riset CORE atau *Center of Reform on Economics* memberi pernyataan bahwa ambang resesi sudah mendekati perekonomian di Indonesia selama masa pandemi covid-19 ini. Sudah seharusnya resesi ini menjadi kebiasaan baru karena hampir seluruh negara terdampak pandemi covid-19.

Pendapat lain menyatakan bahwa perekonomian Indonesia sudah masuk dalam kategori resesi dan melihat hasil dari BPS atau Badan Pusat Statistik sendiri yang diperkirakan pada kuartal III pertumbuhan ekonomi Indonesia akan minus sekitar 1,3-1,7 persen, pendapat ini dikemukakan oleh Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif INDEF atau *Institute for Development of Economics and Finance*.

Piter Abdullah Redjalam selaku Direktur Riset CORE atau *Center of Reform on Economics* mengatakan bahwa dengan kondisi resesi yang menjadi kebiasaan baru seluruh negara yang terdampak covid-19 bahwa yang menjadi pembeda yakni terletak pada kedalaman dan kecepatan negara tersebut *recovery*. Melihat keberadaan UMKM yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia bisa menjadi salah satu pendorong dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia tidaklah sedikit, menurut BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia hingga 64 juta dan menjadi 99,9 persen usaha yang bergerak menopang perekonomian di Indonesia.

Dalam pelansiran Kemenkop UKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) bahwa terdapat 8 juta UMKM di Indonesia telah menggunakan media online dalam pemasaran produk. Pada jumlah angka UMKM yang bergerak dalam media online tersebut terhitung 13 persen dari total usaha yang beroperasi di Indonesia.

Melihat jumlah UMKM di Indonesia yang tidaklah sedikit, pemerintah turut andil dalam menyusun berbagai skema program pemulihan ekonomi nasional (program PEN) dalam upaya membangkitkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. Piter Abdullah juga menuturkan bahwa program pemulihan ekonomi nasional (Program PEN) yang terselanggara optimis dalam upaya membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang saat ini melemah karena pandemi covid-19.

Dari pernyataan tersebut, tujuan penulis dalam penyusunan artikel penelitian yakni untuk melihat kondisi dan seberapa besar peran dari UMKM khususnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sedang melemah akibat pandemi covid-19 yang tentunya dibantu oleh beberapa skema kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka dibuat daftar permasalahan yang akan dibahas dalam artikel penelitian ini. Daftar permasalahan yang akan dikaji dalam artikel penelitian ialah:

1. Bagaimana laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020?
2. Bagaimana kondisi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia masa pandemi covid-19?
3. Apa saja kebijakan pemerintah dalam upaya membangkitkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar dapat bertahan dalam kondisi perekonomian yang sedang melemah saat ini?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2016:423) tentang pertumbuhan ekonomi bahwa adanya peningkatan sektor riil ataupun kegiatan yang mengacu pada produksi baik berupa barang maupun jasa yang diperoleh dari suatu negara. Seperti misalnya peningkatan jumlah produksi barang dari perusahaan manufaktur atau pabrik dan industri, adanya peningkatan pemerataan infrastruktur, peningkatan sarana publik negara baik berupa perkembangan jumlah yayasan pendidikan, serta peningkatan dalam produksi barang modal.

Definisi pertumbuhan ekonomi ringkasnya yakni suatu negara dengan kondisi ekonomi yang terukur berdasarkan indikator-indikator tertentu selama periode tertentu. Indikator yang menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi ini seperti adanya peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, jumlah pengangguran yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan tenaga kerja yang ada, dan tingkat kemiskinan yang rendah. Dikatakan terjadinya krisis ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang melambat disebabkan karena adanya penurunan peningkatan pada indikator-indikator yang menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu kegiatan dalam meningkatkan pendapatan tanpa adanya keterkaitan dengan pertumbuhan penduduk. (Rappana, dikutip dalam Ekonomi Manajemen, 2020).

Hal ini bisa menjadi patokan bahwa dalam kegiatan pertumbuhan ekonomi dapat mendeteksi keberhasilan dan tingkat kemajuan suatu negara yang dilakukan dalam periode tertentu. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang signifikan merupakan tanda bahwa pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat berhasil. Tercerminkan pula kemamuran masyarakat dengan melihat pendapatan perkapita yang ada dari jumlah penduduk negara.

Berdasarkan analisis tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat memberikan analisis penerimaan negara dan perencanaan pembangunan yang akan diselenggarakan khususnya bagi pemerintah setempat. Dan sebaliknya, jika keadaan atau kondisi pertumbuhan ekonomi yang melemah dapat dijadikan dasar acuan untuk menerima bantuan baik dana dari pihak luar atau internasional baik dari Bank Dunia maupun dari negara yang bersedia melakukan kerjasama dan memberikan bantuan. Untuk para pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi mampu dijadikan sebuah acuan untuk menentukan perencanaan kedepannya baik dari peningkatan kualitas dan kuantitas produk, sumber daya yang digunakan, dan pemasaran produk (Simulasi Kredit, 2013).

Usaha Mikro Kecil Menengah

Dalam Pasal 1 UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dipaparkan beberapa definisi penting dari UMKM, yakni:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 1 Nomor 20 tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai (1) usaha mikro ialah usaha dalam sektor perekonomian yang dimiliki oleh perorangan dengan memenuhi syarat maupun kriteria UMKM yang diatur dalam UU. (2) usaha kecil ialah usaha dalam sektor perekonomian yang didirikan sendiri baik perorangan maupun badan usaha dimana usaha kecil ini bukan bagian dari cabang usaha menengah atau usaha besar baik dari segi kepemilikan, kekuasaan, maupun menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana kriteria usaha kecil yang diatur dalam UU. (3) usaha menengah ialah usaha dalam sektor ekonomi yang didirikan sendiri baik perorangan maupun badan usaha dimana usaha menengah ini bukan bagian dari cabang usaha kecil atau usaha besar baik dari segi kepemilikan, kekuasaan, maupun menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana kriteria usaha menengah yang diatur dalam UU.

Sedangkan pengertian UMKM menurut UUD 1945 yang kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam karya ilmiah bisa didefinisikan sebagai tahapan ilmiah dalam menemukan data yang valid atau sesuai dengan fakta dan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pembahasan maupun pengetahuan yang selanjutnya dapat dipahami, dipecahkan dan dapat memecahkan masalah dalam bidang pendidikan. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi tiga bagian, yakni metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode R & D atau *Research and Development* (Sugiyono, 2015:5).

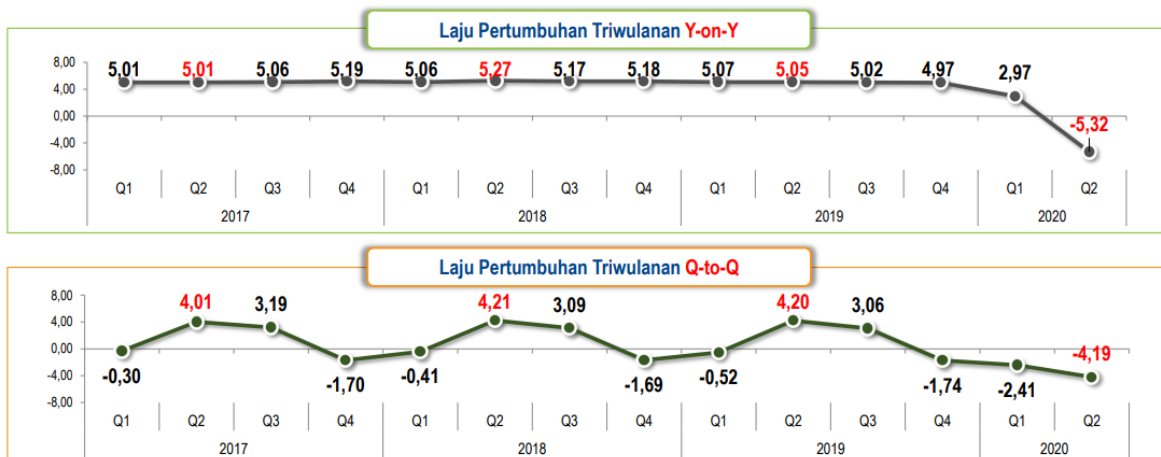
Jenis metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pos-positivisme yang digunakan untuk mengkaji maupun meneliti kondisi objek alamiah, dimana seorang peneliti adalah sebagai kuncinya dimana dalam mengambil representatif sumber data dilaksanakan secara *purposive* dan *snowbal* (Sugiyono, 2015:15).

Metode penelitian kualitatif digunakan pula untuk menjawab permasalahan dengan cara memahami secara mendalam dan seksama sesuai konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, secara wajar dan alami sesuai fakta kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, jenis data yang paling utama yakni data kualitatif (Arifin, 2011:29). Data yang digunakan penelitian ini diperoleh dari website resmi Katadata *Insight Center*, BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terhitung dari tahun 2017 hingga 2020.

Sedangkan sampel data pada penelitian pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2020 yakni data omzet usaha, data jenis usaha, dan data kondisi UMKM di Indonesia sebelum maupun disaat adanya pandemi covid-19. Pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan pengumpulan data sekunder, yakni pengambilan data yang berasal dari BPS, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Katadata *Insight Center* (KIC), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Data-data tersebut diambil melalui pemaparan materi seminar virtual dan website resmi dari masing-masing badan tersebut.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2017-2020



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2017-2020. Sumber: Menko Perekonomian RI, pada Seminar Virtual, 11 Agustus 2020.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari tahun 2017-2020 menurut Lapangan Usaha (Y-on-Y)

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan ke-IV tahun 2017 diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 13.588,8 triliun sedangkan Produk Domestik Bruto perkapita (PDB perkapita) mencapai Rp 51,89 juta. Pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,19 persen pada triwulan IV tahun 2017 (*year on year*). Pertumbuhan pada tahun 2017 ini terjadi pada seluruh lapangan usaha.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 sesuai dengan analisis pengukuran Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 14.837,4 triliun, atas dasar berlaku PDB pada tahun 2018 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Produk Domestik Bruto perkapita (PDB perkapita) pada tahun 2018 mencapai Rp 56 juta. Pertumbuhan ekonomi antara triwulan IV tahun 2018 dengan triwulan IV tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 5,18 persen (*year on year*). Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya (selain Jasa Perusahaan dan Pengadaan Air) sebesar 9,08 persen.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 sesuai dengan analisis pengukuran Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 15.833,9 triliun, atas dasar berlaku PDB pada tahun 2019 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018. Produk Domestik Bruto perkapita (PDB perkapita) pada tahun 2019 mencapai Rp 59,1 juta. Pertumbuhan ekonomi antara triwulan IV tahun 2019 dengan triwulan IV tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 4,97 persen. Pertumbuhan paling tinggi tahun 2019 diraih oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,78 persen.

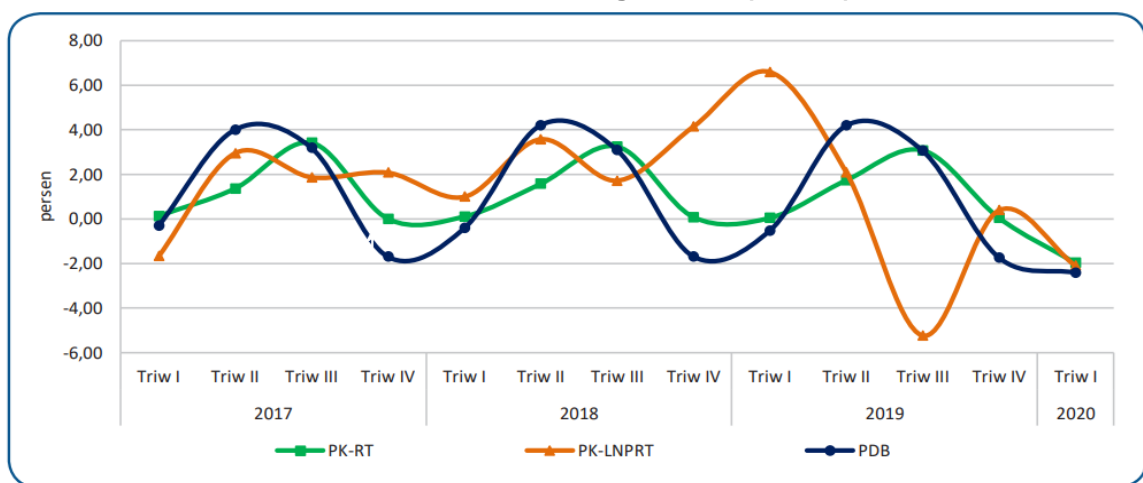
Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2020 sesuai dengan analisis pengukuran Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan II-2020 mencapai Rp 3.687,7 triliun. Hal ini dapat dilihat bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2020 dibanding triwulan II tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen. Penurunan pertumbuhan ini terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha. Sementara lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan hingga mencapai 30,84 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2017 hingga tahun 2020 menurut Lapangan Usaha (Q-on-Q)

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan ke-IV tahun 2017 dibandingkan triwulan IV tahun 2016 (q-to-q)

mengalami kontraksi sebesar 1,70 persen. Penyebab utama dari kontraksi yang cukup signifikan ini dari penurunan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selanjutnya pada perekonomian Indonesia pada triwulan ke-IV tahun 2018 dibandingkan dengan triwulan ke-IV tahun 2017 (q-to-q) juga mengalami kontraksi mencapai 1,69 persen. Penyebab kontraksi pada tahun 2018 ini berasal dari hampir sama dengan tahun 2017, yakni adanya penurunan yang signifikan pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada perekonomian Indonesia pada triwulan ke-IV tahun 2019 (q-to-q) tetap mengalami kontraksi sebesar 1,74 persen. Penyebabnya masih sama dengan tahun 2018 sebelumnya, yakni adanya kontraksi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2020 dibanding triwulan I tahun 2020 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan mencapai 4,19 persen. Transportasi dan pergudangan menjadi salah satu lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan mencapai 29,22 persen.

Data Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran (%QoQ)

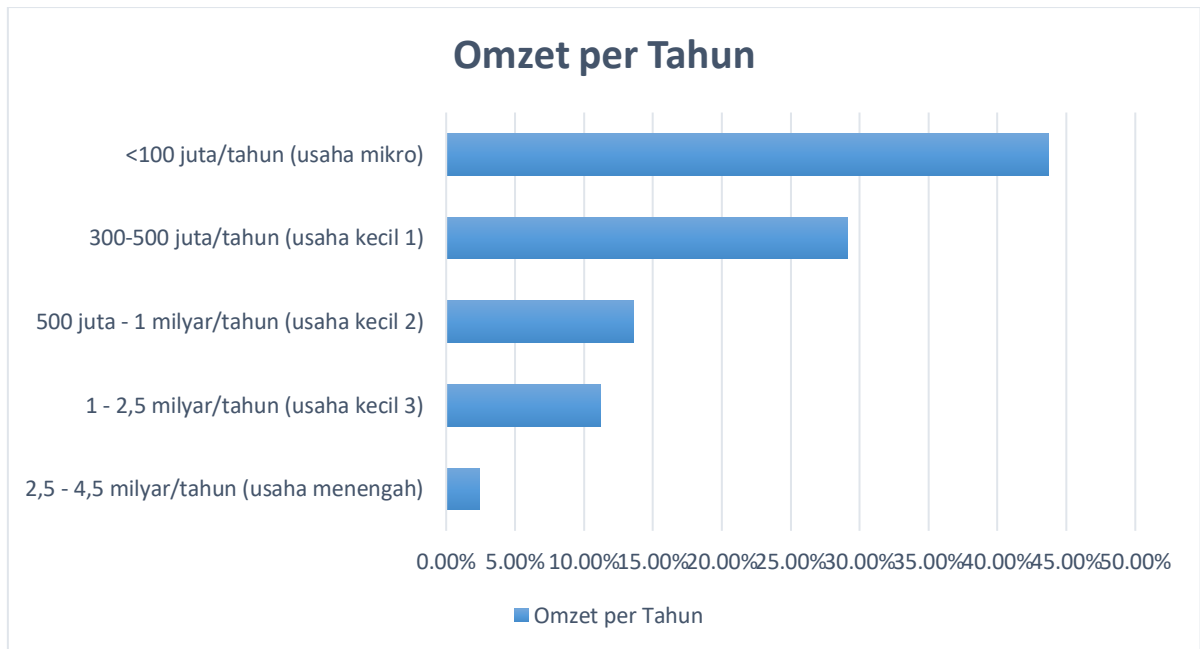


Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2017-2020 (q-on-q). Sumber: Web resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

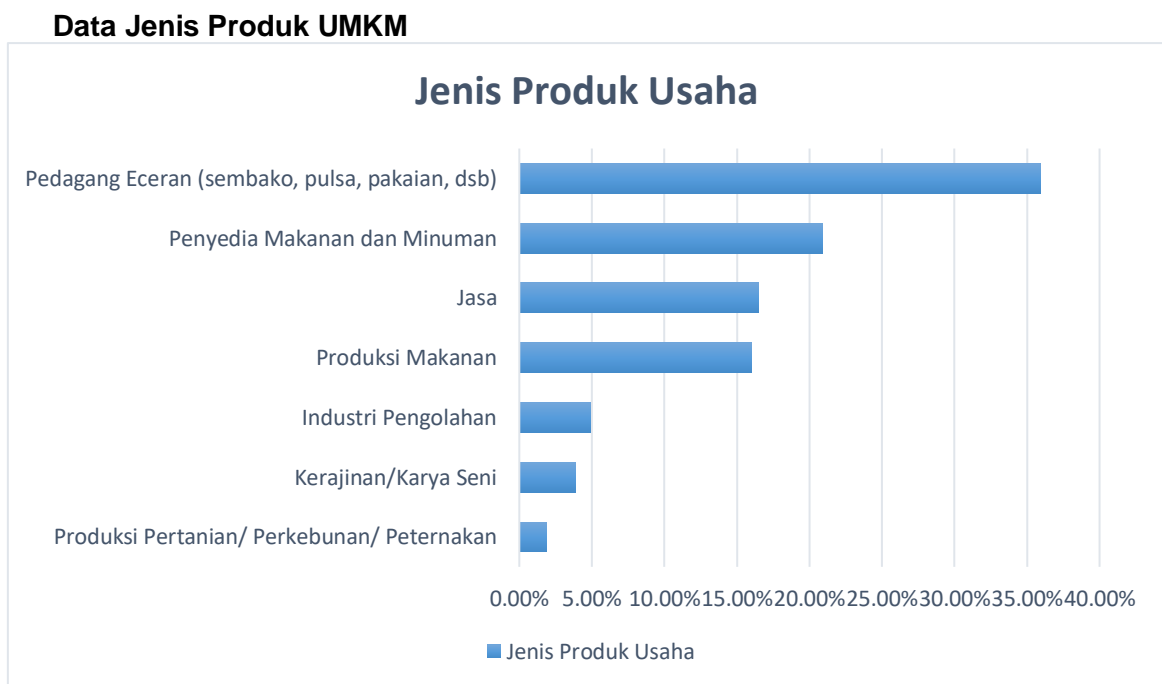
Pertumbuhan Ekonomi PDB Menurut Pengeluaran pada Triwulan ke-II tahun 2020 terhadap Triwulan ke-I tahun 2020 (%QoQ)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan ke-II tahun 2020 terhadap triwulan ke-I tahun 2020 (q-to-q) mengalami kontraksi mencapai 4,19 persen. Pertumbuhan ekonomi negatif yang terjadi hampir pada semua komponen PDB pengeluaran yang menjadi penyebab dari kontraksi ekonomi, kecuali PK-P yang tumbuh sebesar 22,32 persen. Hal ini terjadi semenjak masuknya pandemi covid-19 ke Indonesia pada bulan Maret 2020 yang akan berdampak pada kontraksi PDB triwulan ke II.

Data Omzet UMKM



Grafik 1. Omzet UMKM sebelum pandemi. Sumber: Katadata Insight Center (KIC) pada Seminar Virtual, 11 Agustus 2020.



Grafik 2. Jenis Produk UMKM. Sumber: Katadata Insight Center pada Seminar Virtual, 11 Agustus 2020.

Omzet dan Jenis Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia Tahun 2020

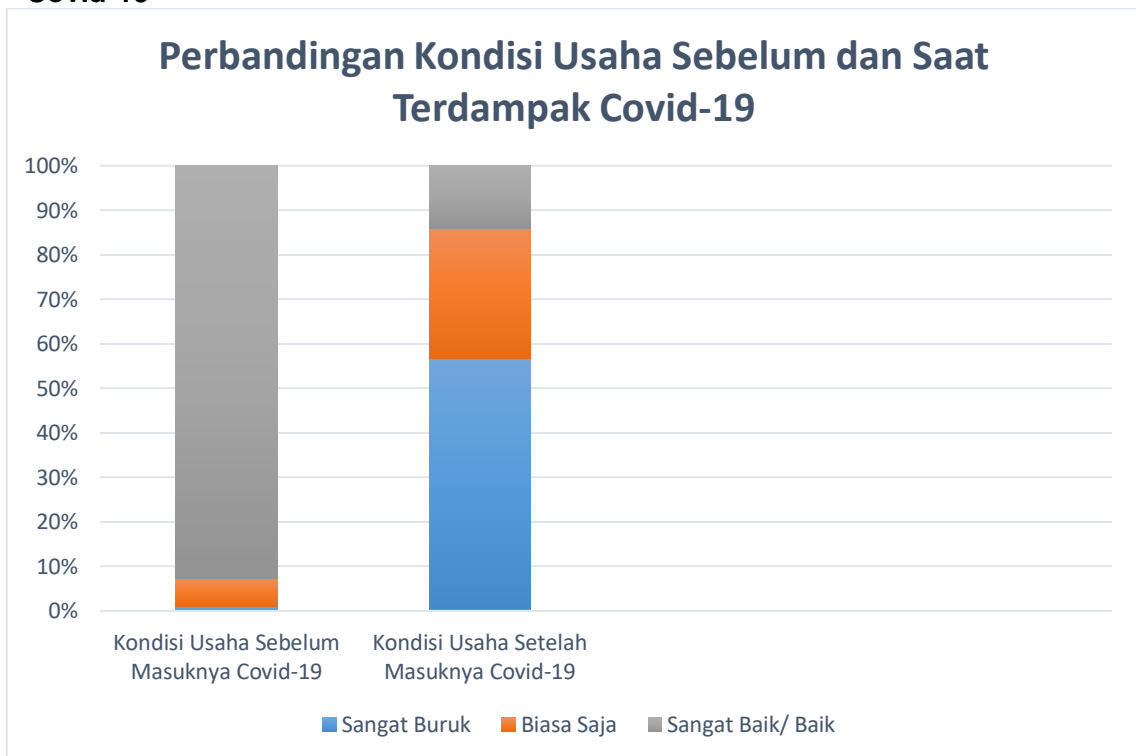
Memasuki pembahasan mengenai Omzet UMKM, menurut survey Katadata Insight Center (KIC) sebanyak 72 persen Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) di jabodetabek per Juni 2020 mencatat omzet dibawah Rp 500 Juta per tahun. Direktur Riset Katadata Insight Center (KIC), Dr. Mulya Amri pada seminar virtual mengatakan 43 persen diantaranya omzet usaha mikro dibawah Rp 100 Juta.

“Dari jenis produk usahanya 50 persen lebih adalah eceran, seperti sembako, pulsa, makanan, dan minuman,” kata Mulya dalam seminar virtual jaga UMKM

Indonesia yang dihadiri lebih dari 100 peserta webinar pada hari Selasa 11 Agustus 2020.

Jenis Produk Usaha yang paling dominan dan menempatkan posisi paling pertama dan paling banyak dijalani oleh para pelaku UMKM yakni berdagang eceran seperti berjualan sembako, pulsa, pakaian, dll) dengan persentase sebesar 35,9 persen. Urutan kedua yang menempati jenis usaha yang paling diminati oleh pelaku UMKM ialah menyediakan makanan dan minuman dengan persentase sebesar 20,9 persen. Urutan ketiga yakni produk jasa sebesar 16,5 persen. Urutan keempat yakni produksi makanan sebesar 16,0 persen. Urutan kelima terdapat industri pengolahan dengan 4,9 persen. Urutan keenam terdapat produk kerajinan atau karya seni sebesar 3,9 persen. Dan urutan yang ketujuh yaitu produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan persentase sebesar 1,9 persen.

Data Perbandingan Kondisi Sebelum Pandemi dan Saat Terdampak Pandemi Covid-19



Grafik 3. Perbandingan Kondisi Usaha sebelum pandemi dan saat terdampak pandemi.

Sumber: Katadata Insight Center (KIC) pada Seminar Nasional, 11 Agustus 2020.

Kondisi Usaha Sebelum dan Saat Terdampak Pandemi Covid-19 secara Umum

Terdapat perbandingan yang sangat signifikan mengenai kondisi usaha sebelum dan saat terdampak covid-19 secara umum. Menurut penilaian pemaparan dalam grafik yang bersumber dari Katadata *Insight Center* pada Seminar Virtual tanggal 11 Agustus 2020, menyatakan bahwa kondisi sebelum covid-19, persentase kondisi usaha baik/sangat baik sebesar 92,7 persen, persentase kondisi usaha biasa saja sebesar 6,3 persen, dan kondisi usaha buruk/sangat buruk sebesar 1,0 persen. Dimana dalam persentase sebelum masuknya covid-19 dinilai berjalan dengan lancar, tidak banyak kendala, dan minimnya kondisi buruk dalam usaha.

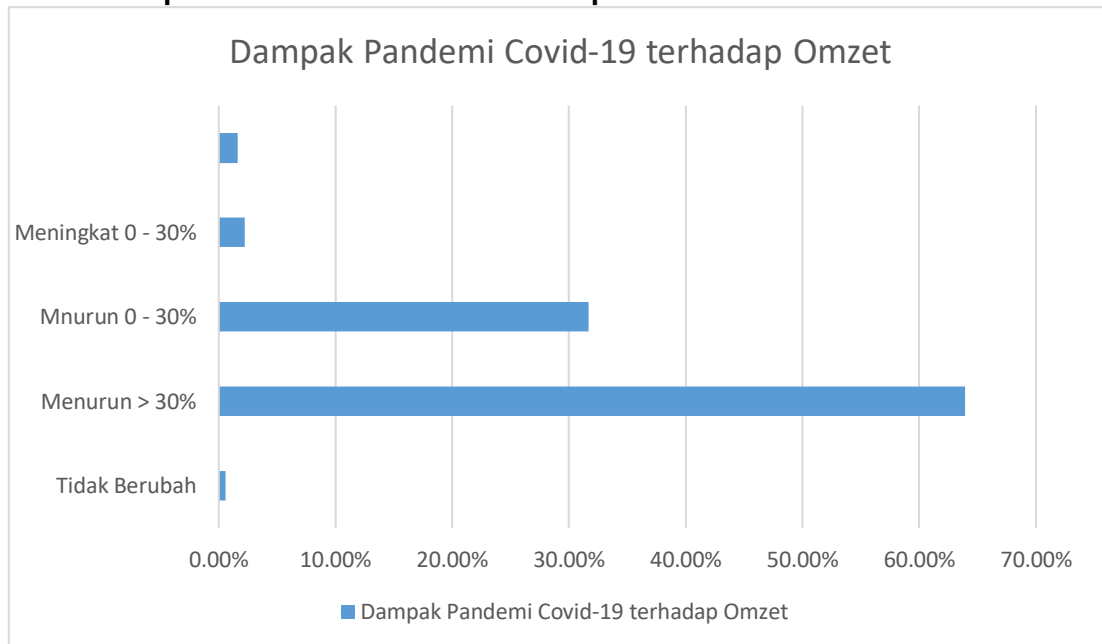
Namun jika melihat kondisi usaha saat ini (per Juni 2020) menurut survey yang telah terpaparkan dalam grafik yang bersumber Katadata Insight Center (KIC) bahwasannya kondisi usaha buruk/sangat buruk meningkat sebesar 56,8 persen dibanding yang semulanya hanya sebesar 1,0 persen. Kondisi usaha biasa saja

juga meningkat sebesar 29,1 persen dari yang semula hanya 6,3 persen. Dan kondisi usaha baik/sangat baik menurun, yang semula 92,7 persen menjadi 14,1 persen.

Sehingga bisa disimpulkan terdapat berbagai dampak dari kondisi disaat adanya pandemi covid-19, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI ada beberapa dampak yang timbul, yakni:

- Penurunan permintaan dan turunnya penjualan;
- Penurunan kegiatan, kesulitan sampai dengan penutupan usaha (sementara/tetap);
- Distribusi terhambat;
- Kesulitan bahan baku;
- Kesulitan mendapatkan permodalan usaha.

Data Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Omzet



Grafik 4. *Dampak Pandemi terhadap Omzet UMKM*. Sumber: Katadata Insight Center (KIC) pada Seminar Virtual, 11 Agustus 2020.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Omzet Usaha

Katadata Insight Center melaporkan data penelitian dari para responden (pelaku usaha) yang terdampak covid-19, ada perubahan omzet usaha akibat dampak pandemi covid-19. Dimana sebanyak 63,9 persen para pelaku usaha mendapati penurunan omzet usaha lebih dari 30% dan sebesar 31,7 persen para pelaku usaha mendapati penurunan kurang dari 30%. Sebanyak 2,2 persen yang mengalami kenaikan omzet kurang dari 30% dan terdapat 1,6 persen yang mendapati peningkatan omzet usaha lebih dari 30%. Dan sisanya, terdapat 0,6 persen yang tidak mendapati perubahan signifikan terkait omzet usahanya.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) sebagai Upaya Pemerintah dalam Menangani Dampak Covid-19 terhadap Sektor UMKM Indonesia

Menurut Kemnkeu (2020) salah satu skema yang diupayakan oleh pemerintah dalam membangkitkan sektor UMKM di masa krisis ekonomi akibat penyebaran virus covid-19 yakni program Pemulihan Ekonomi Nasional atau program PEN. Tidak hanya pada sektor UMKM saja, program PEN berupaya menangani seluruh sektor perekonomian di Indonesia yang terdampak covid-19. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 bahwa pemerintah menjalankan program

Pemulihan Ekonomi Nasional (program PEN) sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

Berbagai tujuan ditegaskan dalam program PEN dimana yang paling utama terselenggaranya program PEN ialah usaha untuk menjamin, menaungi, menyelamatkan, memperkuat, serta mengembangkan kinerja ekonomi para pelaku usaha atau yang sedang merintis usaha selama pandemi covid-19. Harapannya supaya dapat mempertahankan eksistensi UMKM juga membangkitkan kemampuan UMKM dalam perannya terhadap keberlangsungan perekonomian Indonesia.

Dalam pelaksanaan program PEN tentunya memerlukan modal yang begitu banyak agar hasil yang dicapai dapat maksimal dan sesuai dengan harapan. Perolehan modal program PEN berasal dari beberapa sumber, yakni:

- a. Belanja negara, digunakan untuk subsidi bunga UMKM melalui lembaga keuangan sebesar Rp 34,15 triliun;
- b. Penempatan dana, digunakan untuk perbankan yang terdampak restrukturisasi;
- c. Penjamin, digunakan untuk kredit modal kerja sebesar Rp 6 triliun;
- d. Penyertaan modal negara, untuk BUMN yang permodalannya terdampak dan penugasan khusus; dan
- e. Investasi pemerintah, digunakan untuk modal kerja (Kemenkeu, dikutip dalam PP/23, 2020).

Dalam penyelenggaraan program PEN terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Paparan mengenai prinsip-prinsip program PEN diantaranya:

- a. Berlandaskan prinsip keadilan sosial;
- b. Sepenuhnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat karena program ini dialokasikan sepenuhnya kepada seluruh pelaku ekonomi di Indonesia guna membangkitkan kinerja dan aktivitas masyarakat, khususnya sektor UMKM;
- c. Membangun, meningkatkan, dan mempertahankan kinerja para pelaku usaha. Masuknya pandemi covid-19 di Indonesia memberikan pengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang kian menurun. Dengan demikian pemerintah menaruh harapan dalam penyelenggaraan program PEN ini supaya kegiatan perekonomian dapat *survive* di masa ekonomi krisis;
- d. Mengimplementasikan pedoman kebijakan dengan kehati-hatian, sistem manajemen yang baik, transparan, adil, dan akuntabel;
- e. Tidak menyebabkan risiko moral (ekonomi) / *moral hazard*. Menurut Wikipedia (2018) Moral hazard atau risiko moral dalam pembahasan ekonomi ini memiliki pengertian bahwa salah satu pihak dalam kegiatan transaksi mendapatkan tambahan risiko yang membawa dampak buruk kepada pihak lain dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, moral hazard mengakibatkan salah satu pihak akan terkena kerugian karena pihak lain setelah terjadinya transaksi keuangan terjadi.
- f. Pembagian baya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing (Kemenkeu dikutip dalam PP/23, 2020).

Kebijakan Pemerintah dalam Usaha Mendorong Pemberdayaan UMKM di Indonesia masa Pandemi Covid-19

Dalam acara *virtual talkshow* dengan mengusung tema “Strategi Korporasi dalam Membantu dan Mengembangkan UMKM pasca Covid-19” yang diselenggarakan pada 18 Juni 2020, Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa sektor UMKM akan menjadi prioritas utama pemerintah dengan menyelenggarakan segala kebijakan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, terdapat sebanyak lima rumusan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dalam langkah menyelesaikan masalah UMKM yang sedang melemah di tengah pandemi corona.

Pemaparan mengenai kelima langkah kebijakan pemerintah dalam usaha menyelesaikan permasalahan yang menimpa UMKM dipaparkan sebagai berikut.

1. Kebijakan pertama, UMKM dalam mendapatkan bantuan sosial maka 98 persen pelaku usaha dimasukkan ke dalam kelompok miskin.
2. Kebijakan kedua, pembiayaan bunga dan cicilan agar masuk ke dalam program restrukturisasi penundaan cicilan 6 bulan. Ketidaksanggupan dalam membayar cicilan, bunga serta *cashflow* menjadi permasalahan sebagian besar UMKM.
3. Kebijakan ketiga, menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai pembayaran UMKM. Airlangga Hartato selaku Menko Perekonomian menjelaskan bahwa KUR ini didorong untuk semua sektor, akan tetapi lebih difokuskan untuk membangun KUR berbasis kelompok atau klaster karena lebih efisien untuk perekonomian.
4. Kebijakan keempat, mendorong pembelanjaan pemerintah dengan memprioritaskan produk UMKM. Teten Masduki selaku Menkop UKM mengatakan bahwa Kementerian Koperasi UKM mengadakan kerja sama dengan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). Potensi nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha kecil tahun 2020 sebesar Rp 321 triliun dari total rencana pengadaan pemerintah sebesar Rp 738 triliun.
5. Kebijakan kelima, UMKM mampu mengembangkan beragam ide, inovasi, dan beradaptasi dengan pasar baru. Faktanya, hanya sebesar 13 persen dan terhitung 8 juta pelaku UMKM yang melakukan pengembangan ide, inovasi, dan beradaptasi pada pasar baru melalui berbagai platform digital atau secara *online*, sementara 87 persen lainnya masih memasarkan secara *offline*.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai kondisi para pelaku UMKM dan pemaparan seputar kebijakan yang diambil upaya membangkitkan kinerja UMKM yang melemah di masa pandemi covid-19 dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut.

- a. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 mengalami kontraksi atau penurunan yang signifikan.
- b. Omzet dan jenis usaha mengalami perubahan saat sektor perekonomian Indonesia terdampak pandemi covid-19.
- c. Berbagai langkah dan kebijakan seperti program Pemulihan Ekonomi Nasional (program PEN) menjadi pegangan pemerintah dengan harapan membantu membangkitkan kembali aktivitas masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM di masa ekonomi krisis akibat pandemi.

Saran

Hasil pemaparan penelitian mengenai sektor perekonomian yang terdampak pandemi covid-19 khususnya sektor UMKM dan beragam langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah upaya menangani permasalahan sektor perekonomian ini perlu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dengan menambahkan data-data resmi yang terbaharukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A. & Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anggraeni, F, dkk. (2011). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi

- Kecamatan Blimbing, Kota Malang)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1 (6), 1286-1295.
- Arifin, Z. (2011). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017 Tumbuh 5,19 Persen*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Available at <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html> [diakses tanggal 10 September 2020].
- _____. (2019). *Ekonomi Indonesia 2018 tumbuh 5,17 Persen*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Available at <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/06/1619/ekonomi-indonesia-2018-tumbuh-5-17-persen.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%20tahun%202018%20yang,atau%20US%243%20927%2C0.&text=Ekonomi%20Indonesia%20triwulan%20IV%2D2018,y%2Don%2Dy>. [diakses tanggal 10 September 2020].
- _____. (2020). *Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Available at <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>. [diakses tanggal 10 September 2020].
- _____. (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Available at <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html#:~:text=Ekonomi%20Indonesia%20triwulan%20II%2D2020%20terhadap%20triwulan%20sebelumnya%20mengalami%20kontraksi,Komponen%20Ekspor%20Barang%20dan%20Jasa>. [diakses tanggal 10 September 2020].
- Bayu, D. J. (2020). *Ekonomi Mulai Pulih, Menko Airlangga Yakin Pertumbuhan 2020 bisa 0,25%*. Katadata.com. Available at https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5f4b214b6b090/ekonomi-mulai-pulih-menko-airlangga-yakin-pertumbuhan-2020-bisa-0-25?utm_source=Direct&utm_medium=Tags%20Pertumbuhan%20Ekonomi&utm_campaign=Indeks%20Pos%2014 [diakses tanggal 12 September 2020].
- Dewi, R. K. (2020). *Menilik Potensi Resesi Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19*. Kompas.com. Jakarta: Kompasiana. Available at <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/07/090500665/menilik-potensi-resesi-ekonomi-indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19-?page=all> [diakses tanggal 12 September 2020].
- Ekonomi Manajemen. (2020). *Pengertian Pertumbuhan Ekonomi: Definisi Teori, CiriCiri dan Faktor yang Mempengaruhi*. EkonomiManajemen.com. Available at <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/275-pengertian-pertumbuhan-ekonomi-definisi-teori-ciri-ciri-dan-faktor-yang-mempengaruhi#:~:text=Menurut%20pendapat%20Prof.%20Simon%20Smith,jenis%20barang%20ekonomi%20kepada%20masyarakatnya>. [diakses tanggal 18 Oktober 2020].
- Hartato, A. (2020). *Keynote Menko Perekonomian. Gotong Royong Jaga UMKM Indonesia*. 11 Agustus 2020, Jakarta, Indonesia. Hal. 2-12.
- Katadata Insight Center. (2020). *Survei UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. Gotong Royong Jaga UMKM Indonesia*. 11 Agustus 2020, Jakarta, Indonesia. Hal 4-10.
- MPR RI. 1998. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi*. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No.20 Tahun 1999 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 93. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Ridlo, M., & Setyani, D. (2020). Pengaruh Zakat, Inflasi dan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2018 (Studi Kasus). *Jurnal Ekombis*, 6 (1), 77.
- Simulasi Kredit. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi, Pengertian dan Pengukurannya*. simulaskredit.com. Available at <https://www.simulasikredit.com/pertumbuhan-ekonomi-pengertian-dan-pengukurannya/> [diakses tanggal 18 Oktober 2020].
- Stigler, G. J. (1961). The Economics of Information. *Journal of Political Economy*, 63 (3), 213-225.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.